

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rnika Cipta, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Basri. Hasan, Nata Manggala, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugu Yogya, Yogyakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salindeho, John, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono, 1993, *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa / OOD dan Masalah Ganti Rugi,dalam MA*, Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Arkola, Surabaya
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Sutedi, Adrian, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Ed. 1 Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tamrin, Husni, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Pranjoto, Eddy WS, 2006, *Antimoni Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, CV Utomo, Bandung

B. Jurnal/Artikel-Majalah/Tesis-Disertasi:

- Boedi Djatmiko, 2009, *Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Pengadilan dan Akibat Hukum Terhadap Sertifikat dan Hak Atas Tanah (Desertasi tidak diterbitkan)*
- Data Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Berkas Perkara Nomor : BP/77/II/2011/Reskrim Tanggal 23 Februari 2011 dari Resume Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara*. Tanggal 14 Februari 2011
- Data Lawfirm TM Mangunsong, 2010, *Perkara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Melawan Sudirjo dan Hadiono*
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SURAT KEPUTUSAN : 204/HM/BPN.31-BTL/2010 tentang *Pembatalan :1. Sertifikat Hak Milik No 617/Marunda Tercatat Atas Nama Sudirdjo Seluas 16.000 M² (Sebagai Pengganti Yang Hilang Sertifikat Hak Milik No.831/Segara Makmur Seluas 16.100 M²) Dan Memulihkan Kembali Posisi Awal Sertifikat Hak Milik Nomor 831/Segaramakmur Atas Nama Sudirdjo*
2.*Sertifikat Hak Milik No 618/Marunda Tercatat Atas Nama Hadiono Seluas 18.485 M² (Sebagai Pengganti Yang Hilang Sertifikat Hak Milik*

No.830/Segara Makmur Seluas 22.165 M²) Dan Memulihkan Kembali Posisi Awal Sertifikat Hak Milik Nomor 830/Segaramakmur Atas Nama Hadiono Terletak Di Kelurahan Marunda (Dahulu Kel.Segara Makmur), Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara (Dahulu Kabupaten Bekasi) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hermayulis, *Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 10, 2000.

Sofyan, Syafran, *Sertifikat Hak Atas Tanah, Majalah Renvoi Nomor 2.134 Edisi Juli 2014*, PT Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)*

Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*

D. Internet :

Letezia Tobing, *Prosedur Jika Sertifikat Tanah Hilang*, www.hukumonline.com